

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK SISWA**

*IMPLEMENTATION OF POLITICAL EDUCATION THROUGH PANCASILA AND
CIVIC EDUCATION LEARNING TO IMPROVE STUDENT POLITICAL AWARENESS*

Asmika Rahman, Suharno

Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Negeri Yogyakarta
Jalan Colombo 1, Yogyakarta
email: asmikarahman89@gmail.com

Abstract: this article describes the implementation of political education through learning Pancasila and Civic Education learning to increase the political awareness of students in Abu Bakar Integrated Islamic High School Yogyakarta. This research used descriptive qualitative method. This study gathers data use interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of political education through learning Pancasila and Civic Education learning was using the 2013 Curriculum and KTSP, the development of the material, and the use of learning models. Factors that support the implementation of political education are the application of a national curriculum, professional teachers, extracurricular activities, and the availability of facilities.

Keywords: political education, Pancasila and Civic Education learning, political awareness

Abstrak: tulisan ini mendeskripsikan hasil penelitian tentang melaksanakan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn untuk meningkatkan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menggunakan kurikulum 2013 dan KTSP, adanya pengembangan materi, serta penggunaan model pembelajaran. Faktor yang mendukung pelaksanaan pendidikan politik antara lain adalah penerapan kurikulum nasional, guru yang profesional, kegiatan ekstrakurikuler, serta tersedianya sarana dan prasarana.

Kata Kunci: pendidikan politik, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kesadaran politik

PENDAHULUAN

Siswa merupakan generasi muda yang memiliki andil besar dalam melanjutkan kepemimpinan pada masa yang akan datang. Baik atau buruknya nasib suatu bangsa bergantung pada kualitas para generasi mudanya. Generasi muda yang sejak dini semangat untuk membekali diri dengan

ilmu pengetahuan maka akan berdampak baik untuk kemajuan bangsa.

Siswa yang berada pada masa remaja memiliki kondisi psikis yang labil, karena pada usia tersebut siswa masih melakukan pencarian jati diri atau penyesuaian diri. Pada usia ini, seorang individu juga sedang berusaha untuk mengembangkan berbagai

aspek yang dimiliki baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan dan positif antara dukungan sosial dan konsep diri dengan penyesuaian diri remaja (Aristya & Rahayu, 2018). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seorang remaja mudah dipengaruhi oleh lingkungannya karena dapat membentuk sikap dan perilakunya, baik ke arah yang positif atau negatif. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.

Masa remaja merupakan periode penting karena akibatnya yang langsung berdampak terhadap sikap dan perilaku (Izzati, 2013). Pada usia remaja, seorang individu juga mulai menyerap berbagai informasi. Oleh karena itu, pada usia remaja siswa lebih mudah untuk diarahkan pada konsep-konsep positif yaitu konsep keilmuan. Konsep keilmuan yang diserap termasuk juga di dalamnya berbagai konsep politik. Hal ini menjadi penting agar siswa tidak buta terhadap politik dan hanya menjadi sasaran pembodohan politik, karena siswa yang dikatakan sebagai pemilih pemula memiliki kedudukan strategis dalam setiap pelaksanaan politik praktis yaitu pemilihan umum.

Pemilih pemula memiliki kedudukan strategis dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum karena secara kuantitatif jumlahnya relatif banyak, pemilih pemula merupakan salah satu bagian pemilih yang memiliki pola perilaku sendiri dan sulit diatur atau diprediksi, kekhawatiran adanya kecenderungan untuk tidak memilih karena bingung banyaknya partai politik yang muncul pada akhirnya membuat pemilih pemula tidak memilih sama sekali, dan setiap organisasi sosial politik menyatakan sebagai organisasi yang cocok menjadi sarana penyaluran aspirasi para pemilih pemula (Setiajid, 2011).

Politik merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga hal ini menjadi penting

dan berkaitan erat dengan status individu sebagai warga negara. Begitu pula dengan pendidikan dan politik, ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan serta saling berkaitan. Seperti yang diungkapkan oleh Sirozi (2010) bahwa lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat, dan sebaliknya lembaga-lembaga dan proses politik berdampak besar pada karakteristik pendidikan negara.

Pendidikan politik adalah kegiatan edukatif yang intensional dan sistematis untuk mengarahkan individu pada proses belajar berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pendidikan politik sebagai upaya yang disengaja untuk memengaruhi individu agar lebih aktif dalam perjuangan politik dan memiliki tanggung jawab etis yang tinggi dalam kegiatan politiknya (Cholisin, 2013).

Saat ini, pelaksanaan pendidikan politik pada masyarakat umum cenderung kurang efektif, bahkan dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena sedikitnya peraturan atau undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pendidikan politik. Ada satu undang-undang saja yang mengatur tentang pendidikan politik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik, dan negara dalam hal ini pemerintah tidak melibatkan diri untuk melakukan pendidikan politik. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik yang menjelaskan bahwa negara hanya memfasilitasi program-program pendidikan politik yang dilakukan oleh para agen politik.

Dengan demikian, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan politik bagi remaja harus diberikan, mengingat dalam pendidikan politik tidak sekedar pemberian teori mengenai politik, tetapi juga harus mengetahui cara untuk

mengimplementasikannya dalam aktivitas politik. Hal ini dimaksudkan agar remaja memiliki pengetahuan politik, kesadaran politik, sikap, nilai, orientasi, dan mampu berprestasi dalam politik (Zamroni, 2002).

Pendidikan politik merupakan hal penting untuk diberikan agar remaja tidak mendapatkan pemahaman yang salah tentang politik. Realitas menunjukkan bahwa banyak masyarakat umum yang mengalami ketidakpercayaan terhadap politik. Masyarakat beranggapan bahwa politik itu penuh dengan tipu daya, hanya ingin mementingkan kelompoknya demi mendapatkan jabatan atau kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Pada kenyataannya, tidak sedikit para politikus atau pejabat publik yang terlibat kasus korupsi sehingga harus berurusan dengan lembaga pemberantasan korupsi atau yang lebih dikenal sebagai KPK. Contohnya seperti kasus korupsi E-KTP yang melibatkan Ketua DPR RI periode 2014-2019 Setya Novanto (Hilmi, 2018). Selain itu, ada kasus yang melibatkan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola Zulkifli yang diperiksa KPK sebagai tersangka terkait dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 dan menerima gratifikasi proyek-proyek di Provinsi Jambi (Rachman, 2018).

Kasus korupsi juga menjerat Akil Mochtar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Akil ditangkap KPK karena menerima suap tiga miliar rupiah dari Bupati Gunung Mas serta tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa pemilihan kepala daerah. Kasusnya juga merupakan satu-satunya terpidana korupsi yang mendapat vonis seumur hidup dari pengadilan tindak pidana korupsi. Selain kasus tersebut masih banyak lagi terungkap kasus yang melibatkan seorang politisi dan pejabat publik di Indonesia (Avin, 2016).

Pentingnya pendidikan politik pada remaja menentukan tingginya tingkat kesadaran politik seseorang. Semakin cepat

seorang individu mendapatkan pendidikan politik maka semakin tinggi kesadarannya untuk berpartisipasi dan mampu untuk mengemban tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Pendidikan politik memiliki andil besar dalam mendidik generasi muda supaya mendapatkan pemahaman yang baik dari segi konsep dan simbol politik, terutama untuk membentuk kesadaran politiknya.

Pendidikan politik dapat dijadikan sebagai sarana bagi para remaja untuk mematangkan pemahamannya terhadap orientasi politik secara mendasar yang harus dimiliki agar dapat membentuk kesadaran politik tinggi. Kesadaran politik seseorang tidak akan timbul dengan sendirinya tanpa ada motivasi atau orientasi yang jelas. Orientasi tersebut dapat dibentuk melalui peran keluarga, teman sebaya, media massa, atau interaksi langsung dengan partai politik. Selain itu, lembaga pendidikan juga memiliki peran penting untuk membentuk orientasi politik seseorang. Orientasi tersebut tentu memiliki proses yang panjang agar dapat terbentuk secara baik, yaitu diantaranya melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

Orientasi fundamental akan mudah terbentuk apabila sudah dimulai sejak usia remaja atau setingkat sekolah menengah atas (SMA). Jika seseorang sudah memiliki orientasi politik yang kuat maka kesadaran politiknya akan tumbuh semakin kuat. Kesadaran politik berarti menyangkut pengetahuan, minat, perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat hidupnya sehingga dapat menjalani hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Surbakti, 2007).

Sekolah menawarkan beragam pilihan pembelajaran dan komitmen yang berkaitan dengan topik politik dan demokrasi. Individu dapat lebih mudah untuk mempelajari atau memahami tentang konsep-konsep politik di lembaga persekolahan (Print & Lange, 2012)

karena sekolah mempunyai sistem kurikulum yang sudah direncanakan dan disusun secara baik. Kurikulum dapat dijadikan sebagai media untuk merancang pendidikan politik yang baik karena dapat menunjang proses penanaman dan pembentukan kesadaran politik pada siswa di lingkungan sekolah. Selain itu, pendidikan bagi seorang siswa berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pola pikir dan *soft skill*-nya sehingga akan berdampak positif terhadap kehidupannya. Pendidikan adalah segala situasi yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup (Kadir, 2012). Sekolah mampu mengubah perilaku yang lebih baik bagi siswa untuk bekal menjadi warga negara yang baik di kehidupan masyarakat (Nihayah & Adi, 2014).

Pendidikan juga memiliki peran penting untuk meningkatkan kesadaran politik seseorang dalam lingkungan masyarakat secara umum. Tingkat pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran politik. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka akan semakin tinggi kesadaran politiknya (Sastroatmodjo, 1995). Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat maka semakin rendah pula tingkat kesadaran politik masyarakat.

Pemahaman politik siswa di sekolah didapatkan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang notabene pendidikan politik merupakan kajian tentang demokrasi politik (Winarno, 2014). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara khusus mendidik siswa untuk menjadi warga negara yang baik, karena materi yang diajarkan berupa kaidah-kaidah atau nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa siswa SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta belum memiliki kesadaran

politik yang tinggi karena terkendala oleh keterbatasan waktu, kurang adanya pendampingan atau pengawasan dari guru secara khusus serta kurang adanya praktik secara langsung tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan politik. Peningkatan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta belum terlaksana secara optimal dan masih ada juga siswa yang acuh tak acuh terhadap kegiatan yang ada di sekolah, tidak berpartisipasi dalam organisasi siswa intra sekolah, serta sulit untuk menerima suatu kebijakan dari sekolah.

Kesadaran politik seorang siswa yang berada di lingkungan sekolah berbasis Islam tergolong kurang atau rendah. Temuan awal penelitian ini sejalan dengan hasil temuan yang diungkapkan oleh Rachmiatie (2005) yang menyatakan bahwa pengetahuan para santri tentang peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan politik ada pada kategori sedang dan rendah. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Asyari (2017) bahwa kesadaran politik kaum santri di pondok pesantren Tuhfaatul Ahbab sangat rendah, karena lingkungan sekitar pesantren tidak membuka celah bagi politik untuk masuk ke dalam lingkungan pondok pesantren. Hal ini yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn untuk peningkatan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta. Sekolah ini dipilih karena SMA IT Abu Bakar Yogyakarta merupakan sekolah yang berbasis agama dan menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kurikulum pendidikannya. Sekolah ini memiliki visi menjadi sekolah unggulan dalam keterpaduan keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sehingga hal ini menjadi menarik untuk diteliti.

Pendidikan politik merupakan faktor penting untuk membentuk kesadaran politik warga negara. Kesadaran politik yang tinggi

membentuk sikap politik seseorang yang mendukung sistem suatu pemerintahan. Pendidikan politik sangat penting untuk membangun kesadaran warga negara untuk memiliki kemampuan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan bangsanya (Wuryan & Syaifullah, 2008). Pendidikan politik yang dilaksanakan dengan baik, terencana, terprogram, terarah, terkendali, dan terkoordinasi akan berkontribusi positif bagi pengembangan kesadaran politik atau melek politik (*political literacy*). Pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang berkepribadian politik, agar memiliki kesadaran politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara (Handoyo & Lestari, 2017).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik merupakan suatu upaya edukasi secara sistematis untuk membentuk kesadaran individu dan masyarakat supaya paham akan hak dan kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai warga negara. Selain itu juga agar mengerti nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik agar terciptanya sistem politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan politik dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek politik sehingga menjadi sadar politik, lebih kreatif, dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuknya yang positif (Handoyo & Lestari, 2017). Melalui pendidikan politik diharapkan tercapai adanya pribadi yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Metode pendidikan politik dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu pendidikan politik secara formal, nonformal, dan informal (Handoyo & Lestari, 2017). Metode pendidikan formal dapat digolongkan dalam

tiga tingkatan yaitu primer, sekunder dan tersier. Pada lingkungan pendidikan formal, pemerintah bertindak sebagai penanggung jawab. Pendidikan nonformal adalah segala bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sistematis dan diselenggarakan di luar sistem formal untuk memberikan pola-pola pembelajaran kepada anggota kelompok dalam suatu populasi (masyarakat) baik dari kalangan orang dewasa maupun anak-anak. Metode pendidikan informal adalah metode pendidikan yang tidak terorganisasi dan biasanya juga tidak sistematis.

Media yang digunakan dalam pendidikan politik terdiri atas dua model, yaitu media langsung dan media tidak langsung (Handoyo & Lestari, 2017). Media langsung yaitu masyarakat terlibat secara langsung, kritis dan otonom dalam proses-proses pendidikan yang dilaksanakan, misalnya berbentuk diskusi, pelatihan, *workshop*, debat terbuka, yang semuanya diarahkan pada materi-materi pendidikan. Media tidak langsung merupakan media yang warga negara tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan. Media ini biasanya dipakai dalam proses pendidikan yang dilaksanakan secara massal dengan tujuan membangkitkan kesadaran warga negara atau memberi informasi penting kepada mereka tentang isu publik tertentu yang harus diperhatikan bersama. Media ini digunakan untuk menyebarkan informasi secara massal, misalnya spanduk, selebaran, *newsletter*, iklan di media massa, penyebaran informasi melalui internet, dan sebagainya.

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru, teman, orang tua, atau sumber belajar lain di lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya. Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, tabiat, serta pembentukan sikap dan keyakinan pada peserta didik (Susanto, 2013).

Prinsip dalam pembelajaran yang dapat digunakan ada lima yaitu: (1) *learning is a*

process that involves behavior, sequences of events and outcomes; (2) learning results from experiencing, the learner must in some way act upon or react to a situation that impinges upon him; (3) learning depends upon what the learning dose, this involves how he perceives, how he thinks, how he feels and how he acts, there can be no learning unless he responds in some way; (4) the end results of a learning process in some change in the learner, demonstrable by a change in his behaviour, potential or actual; (5) the change in the learner tends to fixed in the consequences of his behaviour in terms of his own motivational (Beane, 1986).

PPKn sebagai suatu bidang kajian psikologis dan sosiokultural kewarganegaraan individu yang menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemologi, diperkaya dengan disiplin ilmu lainnya yang relevan, dan mempunyai implikasi aksiologis terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Winataputra, 2012). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebijakan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu politik, dan disiplin ilmu yang relevan, yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosiokultural, dan kajian ilmiah kewarganegaraan (Syarbaini, 2010).

PPKn merupakan upaya pedagogis yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, yang memuat materi pemerintahan, kewargaan, sejarah, dan kebangsaan (Muchson & Samsuri, 2015). PPKn bertujuan untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap warga negara yang cinta tanah air (Kaelan, 2016). Melalui penelitiannya Galston (2007) menyatakan pendidikan kewarganegaraan yang diberikan di sekolah sangat penting dalam menentukan karakter

kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan untuk menyiapkan, membina, dan mengembangkan pengetahuan serta kemampuan dasar peserta didik yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan juga tanggung jawab sebagai warga negara yang baik berdasarkan Pancasila (Darmadi, 2012).

Tujuan PPKn adalah terwujudnya warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan tumbuh kembangnya kepekaan, ketanggapan, kekritisian, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara tertib, damai, dan kreatif, sebagai cerminan dan pengejawantahan nilai, norma, dan moral Pancasila (Kemdikbud RI, 2017). Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, berkarakter, demokratis, amanah, jujur, cerdas, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud memahami segala fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2014).

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak sekolah SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta, antara lain: (1) kepala sekolah; (2) guru mata pelajaran PPKn; (3) dan siswa. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn untuk peningkatan kesadaran politik siswa di SMA

Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendidikan Politik melalui Pembelajaran PPKn di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta

Pelaksanaan pendidikan politik melalui mata pelajaran PPKn merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran politik siswa, khususnya siswa SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Guru PPKn mengajarkan materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan politik, contohnya seperti yang tertera dalam standar kompetensi 1 dan standar kompetensi 2 pada kelas XI semester satu, yaitu menganalisis budaya politik di Indonesia dan menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.

Berdasarkan standar kompetensi 1, guru mendeskripsikan pengertian budaya politik, menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik, dan menampilkan peran serta budaya politik partisipan. Berdasarkan standar kompetensi 2, guru mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi, mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani, menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi, serta menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru PPKn memberikan motivasi untuk aktif dalam bersosialisasi di masyarakat, ikut keorganisasian siswa, berperan aktif dalam kegiatan sekolah, dan juga memberikan edukasi tentang keharusan warga negara berperan aktif dalam kehidupan politik, ikut serta dalam pemilu jika sudah cukup umur, mencegah golongan putih, serta bersikap dan bertindak bijak dalam menanggapi isu

negatif tentang politik. Kesadaran politik yang ada di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta sudah cukup baik, dibuktikan dengan aktifnya siswa untuk mengikuti kegiatan sekolah, mentaati peraturan sekolah, aktif dalam keorganisasian siswa yaitu Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA IT Abu Bakar Yogyakarta dan Forum Komunikasi Pengurus OSIS se-Kota Yogyakarta, dan lain-lain.

Hasil observasi dan analisis dokumen menunjukkan bahwa guru PPKn SMA IT Abu Bakar Yogyakarta mempersiapkan kegiatan peningkatan kesadaran politik melalui kegiatan belajar mengajar secara terencana dan terstruktur. Guru PPKn menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap antara lain: membuat program tahunan, program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tahun pelajaran 2018-2019 yang menjadi acuan dan pedoman pembelajaran di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Silabus dan RPP yang dibuat mengacu pada kurikulum 2013 dan ada juga yang masih menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) atau kurikulum 2006. Silabus dan RPP yang dibuat memuat nilai-nilai pendidikan politik.

Rencana pelaksanaan pembelajaran terdiri atas identitas sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, pertemuan, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, sumber pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Pendidikan Politik di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta

Hasil penelitian menunjukkan ada tiga faktor pendukung pelaksanaan pendidikan politik di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Faktor pendukung yang pertama adalah fasilitas sekolah. Fasilitas yang telah dimiliki sekolah telah memberikan kontribusi positif

dalam melaksanakan pendidikan politik pada siswa. Adanya laboratorium komputer dan perpustakaan yang dimiliki sekolah dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pendidikan politik terhadap siswa.

Faktor pendukung yang kedua adalah adanya organisasi siswa intra sekolah. OSIS dapat dijadikan sebagai pelaksanaan pendidikan politik bagi siswa, karena siswa dibiasakan untuk mengelola sebuah organisasi. Selain itu pelaksanaan pemilihan ketua OSIS dapat dijadikan pendidikan politik secara sederhana bagi siswa. Faktor pendukung ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kebijakan sekolah yang menyediakan wadah berbentuk ekstrakurikuler dapat menstimulasi siswa untuk terbiasa berorganisasi. Siswa akan terbiasa memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini dapat dijadikan stimulus dalam pelaksanaan pendidikan politik pada siswa

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendidikan Politik di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta

Pelaksanaan peningkatan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta belum berjalan maksimal karena mendapat hambatan. Hambatan ini bersumber dari kondisi masyarakat sekitar. Faktor penghambat pelaksanaan pendidikan politik di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta ada tiga. Faktor penghambat yang pertama adalah kondisi perpolitikan yang kurang kondusif. Kondisi perpolitikan di Indonesia tidak mendukung dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah. Sekolah mengajarkan konsep dan teori politik sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan, sedangkan keadaan nyata perpolitikan di Indonesia secara umum tidak mendukung terhadap kompetensi tersebut.

Faktor kedua yang menjadi penghambat pendidikan politik adalah kurangnya sosialisasi politik dari instansi terkait. Pentingnya pendidikan politik tidak diiringi dengan peran instansi terkait dalam melakukan

sosialisasi politik kepada para siswa yang notabene harus mendapatkan pengetahuan tentang politik.

Faktor penghambat ketiga yaitu contoh keteladanan elit politik nasional yang sangat minim. Kondisi perpolitikan di Indonesia yang banyak diwarnai KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) membuat kesan buruk bagi kehidupan politik di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan kurang adanya figur politik yang dapat dijadikan contoh sehingga siswa enggan untuk mencari tahu politik secara lebih mendalam.

SIMPULAN

Pendidikan politik dilaksanakan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi pendidikan politik dikembangkan dari materi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, budaya demokrasi, dan sistem pemerintahan Indonesia. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pendidikan politik ada tiga, yaitu: fasilitas sekolah, organisasi siswa intra sekolah, dan ekstrakurikuler. Faktor penghambat pendidikan politik ada tiga yaitu: kurangnya fasilitas sekolah; minimnya sosialisasi politik dari instansi terkait; dan minimnya contoh keteladanan elit politik nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristya, D. N., & Rahayu, A. (2018). Hubungan Dukungan Sosial dan Konsep Diri dengan Penyesuaian Diri Remaja Kelas X SMA Angkasa I Jakarta. *Ikraith-Humaniora*, 2, 75–81.
- Asyari. (2017). Menakar Kesadaran Politik Kaum Santri dalam Dinamika Politik. *Fenomena.*, 16(1), 99–118.
- Avin, R. (2016). *12 Pejabat Negara yang Divonis sebagai Koruptor*. Retrieved from: <https://media.iyaa.com/article/2016/03/12-pejabat-negara-yang-divonis-sebagai->

- koruptor-3436681.html
- Beane, J. A. et. al. (1986). *Curriculum Planning and Development*. Boston: Allyn and Bacon.
- Cholisin. (2013). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Ombak.
- Darmadi, H. (2012). *Dasar Konsep Pendidikan moral*. Bandung: Alfabeta.
- Galston, W. A. (2007). Civic Knowledge, Civic education, and Civic Engagement: a Summary of Recent Research. *Journal of Public Administration*, 30, 623–642.
- Handoyo, E., & Lestari, P. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Izzati, R. E. dk. (2013). *Perkembangan Peserta Didik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Kadir, A. dk. (2012). *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Hilmi, A. (2018). *Kasus E-KTP, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1082710/kasus-e-ktp-setya-novanto-divonis-15-tahun-penjara>.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchson, A. R., & Samsuri, M. (2015). *Dasar-Dasar Pendidikan Moral (Basis Pengembangan Pendidikan Karakter)*. Yogyakarta: Ombak.
- Nihayah, S., & Adi, A. S. (2014). Penanaman Nasionalisme pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro di Tengah Arus Globalisasi. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 03(02), 829–845.
- Print, M., & Lange, D. (Eds.). (2012). *Schools, Curriculum and Civic Education for Building Democratic Citizens*. Rotterdam: Sense Publishers.
- Rachman, D. A. (2018). *Zumi Zola Segera Disidang terkait Kasus Gratifikasi dan Suap*. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/06/20181831/zumi-zola-segera-disidang-terkait-kasus-gratifikasi-dan-suap>
- Rachmiate, A. dkk. (2005). Peta Kesadaran Politik Para Santri di Pesantren Kabupaten Bandung Menjelang Pemilu 2004. *Mimbar, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, XXI(2), 196–216.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Press.
- Setiajid. (2011). Orientasi Politik yang Memengaruhi Orientasi Pemilih Pemula dalam Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010. *Integralistik*, XXII(1), 18–33.
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Susanto, A. (2013). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarbaini, S. (2010). *Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winar (2014). *Seri Pendidikan Politik Buku 1 Pancasila & UUD NRI 1945*. Yogyakarta: Ombak.
- Winataputra, U. S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Wuryan, S., & Syaifullah. (2008). *Ilmu kewarganegaraan (Civic)*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UPI.
- Zamroni. (2002). *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.